Tunjuk Wabup Sebagai Plt Bupati Kudus, Gubernur Jateng : Segera Bangkit

KUDUS - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin rapat terkait keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus setelah kasus yang menimpa Bupati Kudus H.M. Tamzil. Bertempat di Command Center, Minggu (28/7) malam, rapat diikuti oleh Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono, Wakil Bupati Kudus H.M. Hartopo, Sekda Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris beserta unsur pimpinan di lingkungan pemkab.

Ganjar mengimbau kepada pemkab untuk segera berbenah dan melakukan perubahan besar. Malam itu juga, dirinya menunjuk Wabup H.M. Hartopo sebagai Plt (Pelaksana tugas) bupati Kudus melalui surat yang telah ditandatanganinya. H.M. Hartopo akan mengawali kepemimpinannya pada besok senin (29/7).

"Segera bangkit. Pelayanan tidak boleh berhenti, besok pagi beliau (H.M. Hartopo) akan jadi Plt (Plt. bupati Kudus), surat malam ini sudah saya tandatangani. Saya minta besok harus terjadi perubahan besar di seluruh lini. Istilah saya harus ada Kudus Baru. Semua sistem menjadi transparan. Jadikan momentum untuk pembelajaran semuanya," ujarnya.

Gubernur juga telah berkoordinasi dengan KPK dalam upaya pemulihan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Dirinya meminta KPK untuk menempatkan Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan) untuk merombak sistem yang bercelah.

"Sudah minta surat ke KPK untuk ada Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan), naruh orang KPK disini untuk kita rombak seluruh sistem yang menjadi bolongan-bolongan untuk orang bisa melakukan penyalahgunaan kewenangan," katanya.

H.M. Hartopo mengatakan cukup terkejut dengan keputusan gubernur yang menunjuknya sebagai Plt. Bupati Kudus dalam rapat tersebut. Dirinya menilai hal itu demi tetap berjalannya roda pemerintahan secara normal, khususnya dalam bidang pelayanan.

"Saya juga tidak tahu kalau Pak Gubernur kesini membawa misi untuk menjadikan saya Plt. Sudah ada suratnya, surat dari pak gubernur karena beliau menginginkan ini segera jalan. Karena takutnya (pemerintahan) tidak jalan untuk melayani masyarakat dengan normal," ujarnya.

Terkait proses pengisian jabatan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Dalam hal ini panitia seleksi (pansel) akan dilibatkan kembali. Pengecekan ulang juga dilakukan pada proses penilaian dan interview sehingga hasil benar-benar objektif.

"Disuruh mengevaluasi lagi, mungkin besok pansel untuk pengisian perangkat kita undang. Untuk empat jabatan yang dilelang juga perlu kita evaluasi. Assessment yang sudah ada mungkin untuk acuan, kita akan cek interview lagi dan secara teknis. Kita akan Objektif," jelas Wabup.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris mengklarifikasi tentang keberadaannya pada Jumat (26/7) lalu. Kala itu dirinya beserta keluarga berada di Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan. Selain itu, dirinya juga tidak pernah menempati rumah dinas sekda, sehingga diminta bupati untuk dihuni staf khusus.

"Pada hari jumat, saya jam sembilan beserta keluarga ke Jakarta. Ada acara keluarga, paman saya menikahkan anaknya. Saya sudah izin Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati untuk kesana. Perlu kami sampaikan bahwa rumah dinas tidak pernah saya tempati, diminta Pak Bupati untuk staf khusus. Sudah ada berita acaranya untuk staf khusus, jadi secara penuh penguasaannya digunakan oleh staf khusus. Dari berita-berita yang ada bahwa saya dibawa KPK itu tidak benar, saya ke Jakarta ada acara keluarga," jelasnya.

Dirinya juga memberi penjelasan tambahan tentang penyegelan ruang kerjanya. "Kalau ruangan sekda kenapa disegel, karena ada hubungan kepegawaian, administrasi, pasti disegel. Karena administrasi seluruh Kabupaten Kudus ada di Sekretaris Daerah," imbuhnya.